

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM SMART TANI DI KECAMATAN BULU TABA KABUPATEN PASANGKAYU PROVINSI SULAWESI BARAT

Herlianty. B

NPP. 29.1939

Asdaf Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat

Program Studi Studi Kebijakan Publik

Email: herlianty3128@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Teguh Ilham, S.STP.,M.Arts

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): The research focuses on the implementation of the Smart Farming Program policy in Bulu Taba District, West Sulawesi Province, which still faces several challenges. **Purpose:** This research aims to understand and describe the implementation of the Smart Farming Program policy in Bulu Taba District, West Sulawesi Province. It also aims to identify the barriers and facilitators of the Smart Farming Program implementation in Bulu Taba District, as well as the efforts made by the district to overcome these barriers. **Method:** The research method used is descriptive qualitative research with an inductive approach. The data collection techniques employed include observation, interviews, and documentation. The data analysis techniques used are data reduction, data presentation, and drawing conclusions. To understand the implementation of the Smart Farming Program policy in Bulu Taba District, West Sulawesi Province, this study adopts Edward III's theory of public policy implementation, which encompasses dimensions such as communication, resources, implementers' attitudes, and bureaucratic structure. **Result:** The research findings indicate that the implementation of the Smart Farming Program policy in Bulu Taba District, West Sulawesi Province, has been successful in terms of communication, implementers' attitudes, and bureaucratic structure. However, there is still a need for improvement in terms of resources. **Conclusion:** The implementation of the Smart Farming Program policy in Bulu Taba District, West Sulawesi Province, has been successful in terms of communication, implementers' attitudes, and bureaucratic structure. However, there is a need for improvement in the dimension of resources. The challenges faced in the implementation of the policy include low participation of farmers in the BPJS Ketenagakerjaan program and a lack of significant increase in participation in the smart farming program. To overcome these challenges, the local government of Bulu Taba District has made efforts through a series of program activities that focus on organization, interpretation, and application. It is hoped that with these efforts, the implementation of the Smart Farming Program policy can be further enhanced and provide greater benefits for farmers and the community in Bulu Taba District, West Sulawesi Province.

Keywords: Implementation, Smart tani Program, Department of Agriculture

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penelitian berfokus kepada implementasi kebijakan Program Smart Tani di Kecamatan Bulu Taba Provinsi Sulawesi Barat yang masih memiliki beberapa kendala. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi kebijakan Program Smart Tani di Kecamatan Bulu Taba Provinsi Sulawesi Barat, mengetahui hambatan dan pendukung pelaksanaan Program Smart Tani di Kecamatan Bulu Taba dan mengetahui upaya yang dilakukan oleh Kecamatan Bulu Taba dalam mengatasi hambatan yang terjadi. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, paparan data, dan penarikan kesimpulan. Untuk mengetahui implementasi kebijakan Program Smart Tani di Kecamatan Bulu Taba Provinsi Sulawesi Barat ini menggunakan teori implementasi kebijakan publik oleh Edward III yang meliputi dimensi komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Kebijakan Program Smart Tani di Kecamatan Bulu Taba Provinsi Sulawesi Barat sudah terlaksana dengan baik pada Dimensi komunikasi, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Namun pada dimensi sumberdaya masih perlu ditingkatkan. **Kesimpulan:** Implementasi kebijakan Program Smart Tani di Kecamatan Bulu Taba, Provinsi Sulawesi Barat, telah berjalan baik dalam dimensi komunikasi, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Namun, perlu peningkatan pada dimensi sumberdaya. Kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan tersebut adalah rendahnya keikutsertaan petani dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan persentase partisipasi dalam program smart tani yang belum mengalami peningkatan signifikan. Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, pemerintah kecamatan Bulu Taba telah melakukan upaya berupa serangkaian kegiatan program yang meliputi organisasi, interpretasi, dan aplikasi. Dengan demikian, diharapkan implementasi kebijakan Program Smart Tani dapat terus ditingkatkan dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi petani dan masyarakat Kecamatan Bulu Taba, Provinsi Sulawesi Barat.

Kata kunci: Implementasi, Program smart tani, Dinas Pertanian

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan sektor pertanian di Indonesia menjadi salah satu penentu pembangunan ekonomi yang ada di Indonesia karena Indonesia sendiri merupakan negara agraris (Ridwan, 2013). Keberhasilan pembangunan pertanian ditentukan oleh keberhasilan tumbuhnya lingkungan komoditas pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, dan peternakan yang masih kental dalam kehidupan masyarakat di setiap provinsi yang tersebar di Indonesia.

Pembangunan pertanian bila dilihat dari segi potensinya adalah sesuatu yang sangat luar biasa karena dari hasil pertanian manusia bisa bertahan hidup. Namun yang menjadi persoalan yang kita hadapi adalah kurangnya perhatian pemerintah baik masalah regulasi undang-undang agraria dan pertanahan maupun pada persoalan pengalokasian anggaran yang belum memadai, selain itu sumber daya manusia yang kurang berkualitas dalam pengelolaan tanah maupun hasil pertanian.

Sektor pertanian memiliki peranan utama dalam perekonomian nasional dan regional, antara lain dalam bentuk penyerapan tenaga kerja, penyediaan pangan dan bahan baku industri, serta sumber mata pencaharian utama bagi sebagian besar masyarakat, khususnya masyarakat di pedesaan, sehingga bersama-sama dengan sektor industri, pembangunan sektor pertanian menjadi motor utama pembangunan ekonomi.

Sektor pertanian merupakan salah satu penyumbang pendapatan asli terbesar Kabupaten Pasangkayu karena dapat dilihat bahwa pasang kayu memiliki sektor pertanian yang cukup besar dimana hampir setengah dari penduduk yang ada bermata pencaharian petani. Program Smart Tani yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Pasangkayu yang dicetuskan oleh Bupati Pasangkayu H. Yaumil Ambo Djiwa, S.H., saat ini menjadi suatu terobosan yang guna meningkatkan kesejahteraan petani yang ada di Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat.

Dinas Pertanian Kabupaten Pasangkayu yang berwenang dalam dalam melaksanakan program Smart Tani ini masih banyak mengalami kendala pada proses pelaksanaannya. Kendala-kendala tersebut merupakan suatu hambatan yang biasa juga dihadapi oleh sektor pertanian yang ada di Indonesia. Masalah yang dihadapi ini tidak terlepas baik dari petani sebagai penerima Program Smart Tani ataupun kendala-kendala dari Dinas yang memungkinkan terhambatnya tersalurnya bantuan program Smart Tani tersebut.

Dinas Pertanian Kabupaten Pasangkayu yang berwenang dalam dalam melaksanakan program Smart Tani ini masih banyak mengalami kendala pada proses pelaksanaannya. Kendala-kendala tersebut merupakan suatu hambatan yang biasa juga dihadapi oleh sektor pertanian yang ada di Indonesia. Masalah yang dihadapi ini tidak terlepas baik dari petani sebagai penerima Program Smart Tani ataupun kendala-kendala dari Dinas yang memungkinkan terhambatnya tersalurnya bantuan program Smart Tani tersebut.

Tabel 1 Potensi dan Realisasi s/d Agustus 2022

No	Kecamatan	PesertaBPJSTK	Penerima Pupuk Subsidi	Belum Terlindungi
1.	Bambaira	31	534	502
2.	Bambalamotu	332	1214	882
3.	Sarjo	1	302	301
4.	Pasangkayu	307	701	394
5.	Pendongga	3	11	8
6.	Tikke Raya	153	121	34
7.	Baras	32	32	0
8.	Bulu Taba	124	215	125
9.	Lariang	3	48	46
10.	Dapurang	0	633	633
11.	Doripoku	0	244	244

No	Kecamatan	PesertaBPJSTK	Penerima Pupuk Subsidi	Belum Terlindungi
12.	Sarudu	3	236	233

Sumber: BPJS Kabupaten Pasangkayu (2022)

Berdasarkan **tabel 1** dapat dilihat bahwa belum semua petani yang menerima bantuan dari Dinas Pertanian Kabupaten Pasangkayu berupa pupuk belum terlindungi atau bahkan belum terdaftar sebagai penerima bantuan dari BPJS ketenagakerjaan. Dimana dapat dilihat bahwa belum optimalnya pemerataan pemberian Program Smart Tani kepada petani yang ada di Kabupaten Pasangkayu. Akan tetapi sudah ada kecamatan yang melaksanakan pendataan secara merata yaitu kecamatan Baras kepada semua petani yang ada di wilayah kecamatan Baras tersebut yang kemudian pencapaian ini harus dapat dicontoh oleh kecamatan lainnya.

Salah satu kecamatan yang masih banyak memiliki petani yang belum terlindungi atau belum terdata di BPJS Ketenagakerjaan adalah kecamatan Bulu Taba. Berdasarkan **table 1** terdapat 125 petani yang belum terdata sebagai peserta program Smart Tani.

Berdasarkan berbagai uraian sebelumnya, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian berjudul “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM ‘SMART TANI’ DI KECAMATAN BULU TABA PROVINSI SULAWESI BARAT”.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Implementasi program Smart Tani masih terdapat beberapa hambatan dan masalah dimana masih lambatnya pendataan dan masih kurang sadarnya petani untuk ikut serta dalam program Smart Tani ini sehingga Dinas Pertanian Kabupaten Pasangkayu masih kurang optimal dalam pemerataan baik pendataan jaminan sosial mapupun memberikan bantuan. Selanjutnya masalah yang ditemukan yaitu belum tercapainya program Smart Tani kepada seluruh petani/pekebun yang ada di Kabupaten Pasangkayu akibat masih banyaknya petani yang belum terdata sebagai peserta program Smart Tani di Kabupaten Pasangkayu, selain itu juga hambatan dalam implementasi program Smart Tani ini yaitu bantuan yang diberi oleh dinas pertanian Kabupaten Pasangkayu masih terbatas dan kualitas yang diberikan oleh dinas pertanian belum cukup baik untuk mendukung. Kemudian masih banyak petani yang belum mendaftar pada BPJS Ketenagakerjaan dimana hal ini membuat terhambatnya petani yang ingin mengurus sebagai penerima program Smart Tani. Selanjutnya kurangnya penyuluh pertanian yang ada pada Dinas Pertanian Kabupaten Pasangkayu untuk membantu petani yang ada pada kelompok tani. Selanjutnya yaitu kesadaran masyarakat dan sosialisasi yang masih minim membuat imlementasi pada Program Smart Tani ini masih belum optimal pada penerapannya.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian pertama adalah penelitian yang dilakukan Nonny Lavka Vanya (2022) yang berjudul “Sosialisasi Aplikasi Among Tani oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan untuk Mewujudkan Kota Batu sebagai “Smart City” (Studi pada Sosialisasi Aplikasi Among Tani untuk Mewujudkan Smart City). Peneliti tersebut menggunakan metode Kualitatif Deskriptif. Dengan hasil penelitian adalah Implementasi program Smart Tani sebagai upaya mensejahterakan masyarakat dalam hal ini adalah para petani yang tinggal di desa-desa yang masih berada pada garis kemiskinan.

Penelitian kedua dilakukan oleh Oeng Anwarudin (2017) yang berjudul “Faktor Penentu Partisipasi Petani Pada Program Upaya Khusus Padi di Kabupaten Manokwari Papua Barat”. Peneliti tersebut menggunakan metode penelitian kuantitatif yang memusatkan pada pengumpulan data kuantitatif yang berupa angka-angka untuk kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis statistika. Dengan hasil penelitian adalah Implementasi program Upaya Khusus Padi (UPSUS) sebagai upaya untuk mengurangi kemiskinan melalui program upaya khusus padi untuk mendukung swasembada pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Lailly Mufidah (2020) yang berjudul “Analisis Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Petani Melalui Program Petani Mandiri (PPM).” Peneliti tersebut menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan pengamatan (observation), wawancara (interview), dan studi pustaka (documentation). Dengan hasil penelitian adalah implementasi kebijakan pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam upaya peningkatan kesejahteraan petani berupa Program Petani Mandiri (PPM). Program ini merupakan program prioritas yang berisikan bantuan modal, akses pelatihan serta usaha pengembangan usaha tani, jaminan pembelian hasil pertanian serta asuransi gagal panen. Program Petani Mandiri (PPM) bukan hanya memberi dampak positif terhadap petani, akan tetapi keluarga atau anak petani juga mendapatkan bantuan berupa beasiswa.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh I Wayan Ardika (2017) yang berjudul “Analisis Tingkat Kesejahteraan Petani di Desa Bangli Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan”. Peneliti tersebut menggunakan metode penelitian kuantitatif yang berbentuk asosiatif. Data penelitian diperoleh dari studi kepustakaan, observasi dan kuesioner. Dengan hasil penelitian adalah implementasi kebijakan pemerintah untuk mengetahui pengaruh tingkat pengetahuan terhadap tingkat kesejahteraan petani dengan sarana produksi sebagai variabel mediasi di Desa Bangli Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan.

Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Khodijah (2022) yang berjudul “Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Petani Melalui Program Upsus Pajale Di Lampung Selatan”. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian pendekatan deskriptif kualitatif. Data yang bersumber dari data interview, observasi, dokumentasi, serta analisis data dengan reduksi data, penyajian data, keabsahan data dan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Upsus Pajale telah dijalankan dengan berbagai kegiatan pemberdayaan yaitu : pendampingan pra tanam hingga pasca panen, pelatihan, penyediaan alat dan sarana produksi petani, pengembangan teknologi, pengembangan kemitraan, dan mengembangkan informasi pemasaran, tetapi yang perlu ditekankan kembali adalah proses pemasaran, petani tidak diberikan jaminan harga jual dan belum adanya wadah untuk mengkoordinir hasil panennya, sehingga pemerintah terlihat hanya berfokus dalam peningkatan produksinya. Sedangkan kesejahteraan petani setelah mengikuti Program Upsus Pajale ini adalah bertambahnya lahan produktif, peningkatan hasil produksi, bertambahnya anggota tani, bertambahnya ilmu pengetahuan, adanya lapangan pekerjaan, dan meningkatkan ekonomi petani sehingga petani menjadi sejahtera.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Peneliti melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, Penelitian ini menggunakan teori Edward III (1980) mengenai implementasi kebijakan publik yang melihat keberhasilan suatu kebijakan berdasarkan indikator komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan objek penelitian yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Jika pada penelitian sebelumnya berfokus kepada implementasi program Smart Tani, penelitian ini berfokus kepada implementasi kebijakan Program Smart Tani di Kecamatan Bulu Taba Provinsi Sulawesi Barat. Selain itu penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan Program Smart Tani di Kecamatan Bulu Taba Provinsi Sulawesi Barat, sedangkan penelitian lain hanya berfokus pada kesejahteraan petani.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah implementasi kebijakan Program Smart Tani di Kecamatan Bulu Taba Provinsi Sulawesi Barat, untuk mengetahui faktor penghambat implementasi kebijakan program Smart Tani di Kecamatan Bulu Taba Provinsi Sulawesi Barat, untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Bulu Taba dalam mendukung implementasi kebijakan program Smart Tani di Kecamatan Bulu Taba Provinsi Sulawesi Barat.

II. METODE

Penelitian dengan menggunakan menggunakan metode kualitatif deskriptif yang dikaji dengan pendekatan induktif. Oleh karena itu, pelaksanaan dalam penelitian dilakukan sesuai dengan fakta-fakta yang terdapat di lapangan mengenai implementasi kebijakan Program Smart Tani di Kecamatan Bulu Taba Provinsi Sulawesi Barat.

Peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Pada data primer, peneliti melaksanakan teknik pengumpulan data dengan melakukan observasi langsung di lapangan yaitu di Kecamatan Bulu Taba dengan melibatkan para petani dan aparatur setempat. Sedangkan pada data sekunder, peneliti melaksanakan teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan dokumen, arsip dan laporan yang dimiliki oleh Kecamatan Bulu Taba. Adapun analisisnya menggunakan teori implementasi kebijakan publik (Edward III, 1980) yang menyatakan bahwa keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan publik dapat diukur melalui 4 (empat) dimensi, yaitu komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi kebijakan Program Smart Tani di Kecamatan Bulu Taba Provinsi Sulawesi Barat. dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan publik Edward III (Edward III, 1980) yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan publik dapat diukur melalui 4 (empat) dimensi, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut :

3.1 Implementasi Kebijakan Program Smart Tani di Kecamatan Bulu Taba Provinsi Sulawesi Barat

3.1.1 Komunikasi

3.1.1.1 Transmisi

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pasangkayu Bapak Nurdin, S.Pt., M.Si pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023 yang mengatakan bahwa:

“Saat ini kami masih memaksimalkan terkait program smart tani ini kepada masyarakat yang ada di berbagai kecamatan yang ada di kabupaten pasang kayu dengan menerjunkan langsung kelapangan guna sosialisasi kepada masyarakat dan selalu berkoordinasi kepada camat sampai ke kepala desa agar informasi pelaksanaan sosialisasi akan tersampaikan langsung karena kami mengharapkan seluruh petani yang berada di Kabupaten Pasangkayu mendapatkan jaminan social dimana target yang kita rancang masih berkisar 17 ribu petani aktif.”

Berdasarkan Hasil wawancara di atas. Program Smart Tani yang dibuat oleh pemerintah pada saat ini masih dimaksimalkan dengan terjun langsung kelapangan terkait dengan pemberitahuan adanya program Smart Tani kepada seluruh masyarakat yang berada diberbagai Kecamatan sampai dengan Desa yang berada di Kabupaten Pasang Kayu agar seluruh informasi terkait pelaksanaan program bisa terlaksana dengan baik sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah Kabupaten Pasangkayu. Dengan pernyataan di atas di perkuat dengan wawancara yang dilakukan kepada Camat Bulu Taba Bapak I Komang Suastana,SP pada tanggal 17 januari 2023 mengatakan bahwa :

“Terkait Koordinasi dari pemerintah kami selaku camat pernah di undang mengikuti rapat koordinasi di Kabupaten Pasangkayu bulan maret 2022 dimana terdapat perwakilan camat, kepala desa, petani serta pihak dari bpjs ketenagakerjaan dimana kami berkerja sama membantu menyukseskan program ini, dalam penyampaianya kami selaku penyuluh pertanian wajib mensosialisasikan program ini kepada petani binaan tentu dibantu langsung oleh Dinas terkait yaitu dinas pertanian, dan kami sendiri sudah melaksanakan sosialisasi program ini sebanyak 1 kali di ruang rapat pertemuan yang berada di kantor kecamatan, dengan mengundang seluruh kepala desa yaitu 7 kepala desa dan petani binaan.”

Dari pernyataan di atas menunjukkan bahwa pada pelaksanaan program smart tani ini sudah dikoordinasikan dengan baik kepada seluruh perangkat yang berada di daerah khususnya organ-organ yang penting pada pelaksanaan program dengan melakukan rapat koordinasi sampai dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat terutama petani yang akan mengikuti program ini. Berdasarkan kedua wawancara diatas Pada indikator transmisi sudah berjalan dengan baik dimana pemerintah sudah melakukan rapat, berkoordinasi dampai membuat sosialisasi kepada masyarakat agar tercapainya tujuan yang diharapkan.

3.1.1.2 Kejelasan

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pasangkayu Bapak Nurdin, S.Pt., M.Si pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023 terkait dengan kejelasan pelaksanaan program yang mengatakan bahwa:

“Untuk pelaksanaan program ini masih mengandalkan data para petani yang didapatkan oleh pemerintah kecamatan yang selanjutnya ditindak lanjuti oleh bpjs ketenagakerjaan. Kami masih

terus berusaha mengembangkan dan memberikan pemahaman terhadap seluruh masyarakat agar mau ikut serta dalam program ini karena outputnya juga untuk mensejahterakan para petani. Namun kami sendiri masih mengalami berbagai kendala dan kami masih perlu mengembangkan dimana masih banyak petani yang belum memiliki pemahaman terkait program ini yang membuat seperti acuh tak acuh tak mau tau ketika adanya tim yang turun langsung pada saat pelaksanaan sosialisasi dan masih banyak yang belum terdata sebafei peserta program smart tani”

Pada hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa pemerintah sudah melaksanakan program smart tani ini yang sudah cukup baik. Pada indikator kejelasan program smart tani sudah memiliki kejelasan yang pasti dimana sudah melibatkan beberapa dengan melibatkan beberapa aspek pendukung pada pelaksanaannya. Selain itu terdapat pernyataan yang di sampaikan oleh Kepala BPJS Kabupaten Pasangkayu bapak Muhammad Asrul Arif pada wawancara tanggal 17 januari 2023 terkait kejelasan pelaksanaan, pengembangan dan penerapaaan program ini beliau mengatakan bahwa:

“Sejauh ini, kami masih mengikuti alur yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kami dari bpjs ketenagakerjaan akan memberikan bantuan kepada seluruh kelompok tani yang mengikuti program ini terlebih masih banyak sekali petani yang belum terdaftar pada BPJS ketenagkerjaan ini”

Berdasarkan hasil wawancara di atas pada indikator kejelasan sudah memiliki kejelasan dalam aspek pelaksanaan dimana pemerintah dan pihak dari BPJS ketenaga kerjaan sudah memberikan ruang dan bantuan kepada masyarakat khususnya petani untuk ikut serta dalam program ini. Pemerintah juga masih berusaha mengembangkan dalam hal persebaran informasi ini agar masyarakat lebih banyak yang paham terhadap manfaat program yang dibuat oleh pemerintah.

3.1.1.3 Konsistensi

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pasangkayu Bapak Nurdin, S.Pt., M.Si pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023 mengatakan bahwa :

“Pada pelaksanaan program smart tani saat ini sudah berjalan kami juga terus berusaha untuk selalu membuat cara-cara terbaik untuk mempertahankan program ini agar telaksana dengan baik, dan semuanya saya mengajak untuk bekerja sama untuk terus berusaha mengembagkan melaksanakan program ini yang saya rasa sangat bagus sekali apabila petani semua paham dengan manfaatnya,”

Berdasarkan hasil wawancara di atas pemerintah terus menerus mempertahankan kekonsistenan program yang telah dibuat oleh pemerintah agar program ini terus berjalan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Selain itu terdapat pernyataan dari salah satu pegawai di seksi terkait di bidang yang berada di Dinas Pertanian Kabupaten Pasangkayu Bapak Samrah S.Pd pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023 mengatakan bahwa:

“Terkait pelaksanaan program ini kami selalu diarahkan oleh kepala dinas untuk membuat jadwal kegiatan yang di koordinasikan ke kecamatan dan desa dimana kita ikut serta pada proses sosialisasi, selain itu kami juga memanfaatkan sosial media untuk membantu mengiklankan program ini. Meskipun selalu juga ada pers yang meliput tapi sebisa mungkin kami dalam 1x

sosialisasi paling tidak ada masyarakat tani yang tahu dan langsung ikut serta dalam program, karena sampai saat ini sudah hampir 2 tahun pelaksanaan target masih belum tercapai”

Berdasarkan wawancara di atas pada indikator konsistensi sudah berjalan dengan baik dimana pemerintah dan peranagkat-perangkat yang membantu dalam pelaksanaan program ini sudah melaksanakannya dengan cukup baik dengan berbagai kendala yang dimiliki namun terus berusaha mensosialisasikan maupun membuat inovasi agar terlaksananya program ini dengan baik.

3.1.2 Sumber Daya

3.1.2.1 Staff

Berdasarkan wawancara dengan pegawai di seksi terkait di bidang yang berada di Dinas Pertanian Kabupaten Pasangkayu Bapak Samrah S.Pd pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023 mengatakan bahwa:

“Kami selaku staf yang melaksanakan program ini dan ikut mensosialisasikan terkait dengan program ini sebenarnya sudah paham. Namun kami yang sebenarnya bukan dari latar belakang Pendidikan pertanian agak sedikit di buat bingung jika memberikan sosialisasi dimana sosialisasi ini bukan hanya terkait bantuan BPJS Ketenagakerjaan ada juga terkait hal-hal yang berkaitan dengan perkebunan dan notabene kami sangat kekurangan tenaga ahli di bidang pertanian”

Berdasarkan hasil wawancara di atas pegawai sudah paham terkait dengan program yang ada. Namun masih terkendala dengan tenaga ahli yang sesuai dengan bidangnya untuk menjelaskan dan melakukan pendekatan melalui pertanian yang dimana program ini tidak full berkaitan dengan bantuan BPJS ketenagakerjaan namun ada juga sosialisasi terkait pertanian lainnya. Selain itu wawancara kepada Camat Kecamatan Bulu Taba bapak I Komang Suastana,SP pada tanggal 17 Januari 2023 tentang bagaimana pemahaman pelaksana program smart tani ini :

“Saat ini pemahaman kami sebagai pelaksana kegiatan yang ada sudah cukup baik saya rasa ini tidak terlepas dari masalah pemahaman masyarakat yang sebenarnya. Sehingga membuat program ini belum sempurna tetapi seharusnya yang menjadi pertimbangan juga tambahkan yang sesuai dengan bidang pertanian atau perkebunan agar lebih seimbang dan masyarakat bisa lebih tergerak untuk mengikuti program ini dengan baik”

Berdasarkan wawancara di atas pada indikator staf masih belum berjalan dengan baik dan perlu di tingkatkan dengan kesesuaian program. Dimana program sudah dilaksanakan, pegawai inti serta yang mengikuti rapat koordinasi sudah mengetahui apa yang harus dikerjakan. Namun, yang masih terlewatkan pada aspek kesesuaian terhadap keahlian yang dimiliki yang membuat perlu adanya peningkatan lagi pada indikator ini.. Kemudian hal ini menunjukkan belum maksimalnya program Smart Tani yang ada di Kabupaten Pasangkayu

3.1.2.2 Informasi

Wawancara kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pasangkayu Bapak Nurdin, S.Pt., M.Si pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023 mengatakan bahwa:

“Terkait dengan informasi kami selalu bekerja sama dengan BPJS ketenagakerjaan untuk melakukan kegiatan ini dibantu oleh seluruh penyuluh pertanian untuk terus memberikan informasi kepada masyarakat terkait pelaksanaan program ini berupa sosialisasi”

Berdasarkan wawancara di atas pemerintah sudah menjalankan, bekerjasama serta saling membantu dalam memberikan informasi terkait implementasi program smart tani ini karena sampai saat ini pemerintah masih berusaha mewujudkan program smart tani sesuai dengan tujuan. Selanjutnya wawancara Kepala BPJS kabupaten Pasangkayu bapak Muhammad Asrul Arif Pada tanggal 17 Januari 2023 terkait sosialisasi yang dilakukan

“Sosialisasi yang saat ini dilakukan masih terus berjalan akan tetapi masih ada kendala pada sosialisasi ini dimana kami masih keterbatasan pada tenaga yang memberi sosialisasi itu, kemudian kami membuat jadwal yang dimana tenaga penyuluh ini keliling ke setiap Kecamatan yang ada di kabupaten Pasangkayu dan pada bulan Juni 2022 kami ikut serta pada kegiatan launching program smart tani BPJS Ketenagakerjaan di rangkaian dengan panen padi dan bantuan benih padi yang saya rasa masyarakat sangat suka apabila kita melakukan pendekatan-pendekatan seperti itu dan langsung juga dihadiri oleh Bupati Pasangkayu”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas bisa dilihat bahwa pemerintah dengan aspek pendukunya sudah berusaha memberikan sosialisasi dengan baik. Dan juga melakukan pendekatan-pendekatan kepada masyarakat, ikut serta dalam panen padi sekaligus memperkenalkan kepada masyarakat terkait dengan program smart tani tidak lupa memberikan bantuan kepada masyarakat berupa bibit padi. Dari pernyataan informan di atas pada indikator informasi sudah terlaksana dengan baik dimana pemerintah dan perenangkat pendukung sudah melakukan berbagai informasi sampai dengan ke masyarakat agar program tersebut bisa sampai tepat sasaran.

3.1.2.3 Fasilitas

Wawancara penulis dengan Camat Kecamatan Bulu Taba bapak I Komang Suastana,SP Terkait dengan apakah sarana dan prasarana penunjang sudah memadai pada program smart tani ini:

“Sarana dan prasarana yang ada pada program smart tani ini didukung oleh pemerintah kabupaten seperti kendaraan dinas dan biaya perjalanan dinas apabila melakukan sosialisasi. Namun untuk masyarakat sendiri kami dari kecamatan sedang mencoba mengusulkan lagi kepada kepala dinas dan kepala BPJS agar dalam pelaksanaan kegiatan ini harus terfokus dulu pada 1 kecamatan dan desa di dalamnya door to door mulai pendataan agar semua petani mendapatkan bantuan karena saya akui masih ada desa yang belum ada jaringan dan sangat sulit mengakses padahal daerah sanalah yang harus mendapatkan bantuan yaitu desa Pakawa”

Berdasarkan hasil wawancara di atas terkait dengan sarana prasarana bagi pegawainya sendiri mendapatkan biaya perjalanan dinas apabila ada kegiatan sosialisasi. Namun Camat Bulu Taba memberikan masukan agar pelaksanaan pendataan petaninya door to door agar seluruh pendataan petani bisa merata karena di kecamatan tersebut masih ada desa yang belum di akses jaringan dan masih tertinggal. Selanjutnya wawancara Kepada Kepala Desa Pakawa terkait sarana dan prasarana terkait pelaksanaan program smart tani.

“Kita sebagai Desa yang paling perlu diperhatikan, kami di desa ini juga kebanyakan petani dan pekebun program smart tani juga belum sampai ke kita jaringan telkomsel saja baru ada sejak

2021, kami dari desa berharapnya terkait pelaksanaan perlu di perhatikan dimana kami antar dusun saja cukup jauh”

Berdasarkan wawancara di atas terkait dengan sarana prasarana penunjang kegiatan smart tani ini sudah berjalan dengan cukup baik. Namun perlu di tingkatkan dan di perhatikan. Karena masih adanya desa tertinggal yang belum mengetahui pasti terkait pelaksanaan program smart tani karena sarana prasarana yang tidak memadai untuk ke Kabupaten dan juga dari pemerintah yang belum sampai ke ujung Kabupaten.

3.1.3 Sikap Pelaksana

3.1.3.1 Pangkat Birokrat

Wawancara peneliti dengan bapak kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pasangkayu bapak Nurdin, S.Pt., M.Si Pada tanggal 17 Januari 2023 terkait dengan upaya apa yang diberikan terkait pemilihan personil yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program yang ada :

“Untuk itu sendiri kami sebelumnya sudah melaksanakan rapat intern bersama bupati karena beliau yang pertama kali mencetus program ini, kemudian bapak bupati sudah menunjuk beberapa panitia penting yang membantu dalam mensukseskan kegiatan ini selain dari pemerintah dari pihak bpjs juga yang dilibatkan dengan harapan tidak hanya 17 ribu tani yang mendapatkan bantuan tetapi program ini selalu berjalan tiap tahun dan menjadi program rutin tahunan”

Berdasarkan hasil wawancara di atas pada pelaksanaannya sudah berjalan dengan baik dimana pemerintah sudah merencanakan sejak awal terkait dengan kegiatan program ini dengan baik sekaligus pemilihan terkait panitia yang berada di dalamnya program yang sudah baik dengan orang-orang yang bekerja sama dalam mensukseskan program yang sudah berjalan ini,

3.1.3.2 Insentif

Wawancara peneliti dengan kepala BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Pasangkayu bapak Muhammad Asrul Arif pada tanggal 17 Januari 2023 terkait dengan apakah ada kendala dalam pendanaan program smart tani ini:

“Untuk pendanaan sendiri sampai saat ini belum ada kendala yang begitu rumit karena program ini juga bekerja sama dengan pemerintah kabupaten yang dimana sebelum kami melaksanakan program ini sudah terlebih dulu dibahas pada musrenbang RKPD kabupaten”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dimana tidak adanya kesulitan terkait pelaksanaan kegiatan ini karena sudah memiliki dana yang memadai dan sudah dibahas terlebih dahulu oleh pemerintah daerah sebelum terlaksananya kegiatan ini. Selanjutnya di perjelas oleh pernyataan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pasangkayu bapak Nurdin, S.Pt., M.Si Pada tanggal 17 Januari 2023 terkait dengan masalah pendanaan.

“Terkait pendanaan semenjak awal perancangana program ini kami sudah membaha di musrenbang dan saya rasa untuk pendanaan untuk para penerima bantuan dan kami selaku pelaksana program sudah di bicarakan dan sudah ada aturannya, kami juga melaakukannya sebisa mungkin dengan transparansi baik kami sesame panitia maupun masyarakat yang menerima bantuan.”

Dari pernyataan di atas menunjukkan tidak ada masalah terkait dengan pendanaan dimana terkait pendanaan sudah dibahas pada rapat musrembang dan saat ini kegiatan sudah dilaksanakan bukan hanya penerima bantuan yang mendapatkan dana para panitia juga yang melaksanakan program ini mendapatkan insentif yang semuanya sudah di atur dan disahkan dengan aturan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Dengan demikian terkait insentif menambah biaya program smart tani ini sudah berjalan dengan baik.

3.1.4 Struktur Birokrasi

Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi standar standard operating procedures (SOP).

Sebagian besar usaha tani di Indonesia masih didominasi oleh usaha skala kecil sehingga peran kelompok petani menjadi ujung tombak dalam pembangunan pertanian. Sebagian besar juga petani Indonesia memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Tingkat pendidikan merupakan salah satu penghambat untuk menerapkan smart tani. Penduduk yang berusia lebih dari 40 tahun memiliki lebih sedikit kontak dengan teknologi, sehingga para petani sering memiliki kesulitan dalam menerapkan smart tani. Wawancara peneliti kepada kepala dinas pertanian kabupaten pasang kayu bapak Nurdin, S.Pt., M.Si pada tanggal 17 januari terkait dengan apakah dalam pelaksanaan program smart tani ini sudah sesuai dengan standar operasional prosedur atau belum:

“Untuk saat ini penerapan standar operasional prosedur dalam program smart tani ini masih kami awasi dan sesuai dengan pelaksanaannya biarpun tidak terlepas dari banyaknya masalah yang mengikuti pada program ini”

Berdasarkan hasil wawancara di atas saat ini pada pelaksanaannya peran dari pemerintah kabupaten Pasangkayu kepada para petani sudah cukup baik dan masih selalu diawasi. Dengan adanya program smart tani ini masyarakat yang bekerja sebagai petani menjadi terjamin keselamatannya pada saat bekerja. Kebijakan pemerintah kabupaten Pasangkayu ini disambut baik oleh masyarakat kabupaten Pasangkayu. Akan tetapi pelaksanaan program ini masih jauh dari harapan pemerintah kabupaten Pasangkayu untuk mencakup semua masyarakat kabupaten Pasangkayu yang bekerja sebagai petani

3.2 Faktor-Faktor Penghambat dalam Implementasi Kebijakan Program Smart Tani di Kecamatan Bulu Taba Provinsi Sulawesi Barat

3.2.1 Komunikasi

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Camat Kecamatan Bulu Taba yaitu Bapak I Komang Suastana,SP bahwa :

“Hambatan utama yang saat ini kami rasakan dalam menjalankan program Smart Tani ini yaitu adalah tingkat komunikasi dua arah yang kurang bisa menarik perhatian para petani untuk ikut serta dalam program Smart Tani ini. Kemudian juga masih kurangnya kesadaran petani bahwa pentingnya keikutsertaan mereka mulai dari proses pendataan dan juga kesadaran petani itu sendiri yang membuat program smart tani ini menjadi sedikit terhambat”

Selain masalah yang disebutkan keterbatasan akses internet di beberapa daerah di kabupaten Pasangkayu terutama untuk para petani yang ada di pedalaman hutan juga memiliki faktor belum maksimalnya program smart tani ini. Teknologi pada zaman ini yang bisa digolongkan sebagai

teknologi baru membutuhkan banyak investasi untuk pengembangannya. Ini menjadi tantangan bagi pemerintah kabupaten Pasangkayu untuk menyerap serapan dana untuk bidang pertanian agar lebih bisa menarik investor investor guna menjadikan pertanian sebagai salah satu komoditi unggulan yang ada di kabupaten Pasangkayu.

3.2.2 Sumber Daya

Pengembangan sumber daya manusia merupakan faktor kunci dalam mengembangkan smart tani, dimana program smart tani ini merupakan suatu program jaminan sosial ketenaga kerjaan yang memiliki fungsi perlindungan keselamatan kerja para petani itu sendiri. Berdasarkan hasil wawancara dengan Camat Kecamatan Bulu Taba Bapak I Komang Suastana,SP pada tanggal 17 januari 2023 yaitu:

“saat ini tingkat SDM yang ada pada kalangan petani ini masih kurang baik sehingga petani petani yang ada di kecamatan bulu taba ini seperti acuh dan tak acuh dengan program yang diberikan oleh pemerintah kabupaten. Kita sudah coba untu memberikan pemahaman bagaimana pentingnya dan bagaimana keuntungan yang akan mereka dapat dari program ini”

Dampak yang kemudian diakibatkan oleh pemahaman para petani ini kemudian menghambat proses memaksimalkan program smart tani yang ada di kecamatan Bulu Taba. Pemerintah kecamatan Bulu Taba kemudian mengambil langkah yaitu dengan mengumpulkan para kelompok tani yang kemudian memberikan pemahaman kepada para petani melalui ketua kelompok tani.

3.2.3 Sikap Pelaksana

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala BPJS ketenagakerjaan Kabupaten Pasangkayu bapak Muhammad Asrul Arif Yaitu:

“Pelaksanaan sosialisasi program BPJS Ketenagakerjaan memang tidak dilakukan secara terus-menerus sehingga mengakibatkan kurangnya pemahaman. Secara teknis, peran BPJS Ketenagakerjaan yang paling mendominasi dalam mengupayakan kegiatan sosialisasi manfaat jaminan sosial dibandingkan aktor pelaksana program lainnya”

Sehingga dalam proses memaksimalkan program smart tani ini masih banyak kendala yang akan dialami oleh pemerintah Kabupaten Pasangkayu ini dan terlebih juga kepada BPJS ketenagakerjaan. Hal ini menunjukkan bahwa masih kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan program smart tani ini baik dari Dinas pertanian Kabupaten Pasangkayu, BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Pasangkayu dan pemerintah Kecamatan Bulu Taba.

3.2.4 Struktur Birokrasi

Pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan pada petani di Kecamatan Bulu Taba Provinsi Sulawesi Barat pun masih banyak kendala, pada praktiknya belum mampu menarik perhatian 100% keseluruhan masyarakat pekerja informal untuk ikut bergabung dalam keikutsertaan. Sebutan program smart tani bagi Kecamatan Bulu Taba Provinsi Sulawesi Barat kurang relevan dengan persentase keikutsertaan yang tidak mengalami kenaikan signifikan. Beberapa kendala pun cukup kompleks yang disebabkan oleh faktor utama yaitu adanya keterbatasan personal kemampuan dari BPJS Ketenagakerjaan Kecamatan Bulu Taba Provinsi Sulawesi Barat dalam memberikan informasi atau

edukasi tentang manfaat jaminan sosial. Kendala lainnya yang muncul yaitu adanya keterlambatan penyetoran iuran rutin peserta, penurunan tingkat kepatuhan pembayaran iuran rutin peserta dan faktor sifat manusia yang cenderung sering lupa akan kewajiban melakukan pembayaran iuran rutin.

3.3 Upaya yang Dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Bulu Taba Untuk Menghadapi Kendala-Kendala Pada Pelaksanaan Implementasi Kebijakan Program Smart Tani di Kecamatan Bulu Taba Provinsi Sulawesi Barat

Terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk mendorong implementasi smart tani:

Edukasi dan Kesadaran: Pemerintah perlu membentuk pola pikir yang menyadarkan petani akan pentingnya keselamatan dalam pelaksanaan pekerjaan pertanian sehari-hari. Hal ini dapat dilakukan melalui penyuluhan, pelatihan, dan kampanye yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan petani tentang praktik pertanian yang aman dan efisien.

Pengembangan Infrastruktur Digital: Diperlukan investasi dalam pengembangan infrastruktur digital seperti akses internet yang cepat dan stabil serta pengadaan perangkat teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Hal ini akan memungkinkan petani untuk mengakses informasi pertanian terkini, sumber daya manajemen, dan aplikasi pendukung pengambilan keputusan secara efisien.

Peningkatan Akses ke Teknologi Pertanian: Pemerintah dapat memberikan dukungan dalam hal penyediaan teknologi pertanian yang inovatif dan ramah lingkungan kepada petani di Kecamatan Bulu Taba. Ini dapat berupa penyediaan bibit unggul, pupuk organik, alat-alat modern, atau sistem irigasi yang efisien guna meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian.

Kemitraan dan Jaringan Kolaboratif: Pemerintah dapat mendorong terbentuknya kemitraan antara petani, perguruan tinggi, lembaga riset pertanian, dan sektor swasta. Melalui kolaborasi ini, dapat dilakukan pertukaran pengetahuan, teknologi, dan pengalaman yang dapat mempercepat adopsi smart tani di Kecamatan Bulu Taba.

Insentif dan Dukungan Keuangan: Pemerintah dapat memberikan insentif dan dukungan keuangan kepada petani yang mengimplementasikan praktik smart tani. Hal ini dapat berupa bantuan modal usaha, subsidi teknologi pertanian, atau program insentif lainnya yang mendorong petani untuk mengadopsi praktik pertanian berbasis teknologi.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Secara keseluruhan untuk mengukur Keberhasilan dimensi komunikasi terdapat 3 indikator yang perlu tercapai yaitu indikator transmisi, kejelasan dan konsistensi sudah berjalan dengan baik. Adanya rapat koordinasi, sosialisasi, kejelasan terhadap program sampai dengan inovasi yang terus dilakukan untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya program yang sudah dibuat oleh pemerintah

Keberhasilan dimensi Sumberdaya terdapat 3 indikator yang perlu tercapai yaitu indikator staf, informasi dan fasilitas. Dari ketiga indikator tersebut 2 yang belum berjalan dengan baik pada indikator staf dan fasilitas. Karena pada dasarnya dalam setiap kegiatan harus ada orang yang sesuai dengan bidangnya untuk membangun program tersebut serta sarana dan prasarana yang mendukung agar tersampainya informasi dan bantuan yang tepat sasaran

Untuk mengukur keberhasilan dimensi sikap pelaksana dilihat dari 2 indikator yaitu pangkat birokrat dan insentif yang sudah berjalan dengan baik tidak ada masalah terkait dengan pendanaan dimana

terkait pendanaan sudah dibahas pada rapat musrembang dan saat ini kegiatan sudah dilaksanakan bukan hanya penerima bantuan yang mendapatkan dana para panitia juga yang melaksanakan program ini mendapatkan insentif yang semuanya sudah di atur dan disahkan dengan aturan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Dengan demikian terkait insentif menambah biaya program smart tani ini sudah berjalan dengan baik.

Pelaksanaannya peran dari pemerintah kabupaten Pasangkayu kepada para petani sudah cukup baik dan masih selalu diawasi. Dengan adanya program smart tani ini masyarakat yang bekerja sebagai petani menjadi terjamin keselamatannya pada saat bekerja. Kebijakan pemerintah kabupaten Pasangkayu ini disambut baik oleh masyarakat kabupaten Pasangkayu. Akan tetapi pelaksanaan program ini masih jauh dari harapan pemerintah kabupaten Pasangkayu untuk mencakup semua masyarakat kabupaten Pasangkayu yang bekerja sebagai petani.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah :

1. Implementasi Kebijakan Program Smart Tani di Kecamatan Bulu Taba Provinsi Sulawesi Barat sudah terlaksana dengan baik pada Dimensi komunikasi, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Namun pada dimensi sumberdaya masih perlu ditingkatkan
2. Adapun penghambat dalam pelaksanaan implementasi kebijakan Program Smart Tani di Kecamatan Bulu Taba Provinsi Sulawesi Barat adalah program BPJS Ketenagakerjaan pada petani di Kecamatan Bulu Taba Provinsi Sulawesi Barat pun masih banyak kendala, pada praktiknya belum mampu menarik perhatian 100% keseluruhan masyarakat pekerja informal untuk ikut bergabung dalam keikutsertaan. Program smart tani bagi Kecamatan Bulu Taba Provinsi Sulawesi Barat kurang relevan dengan persentase keikutsertaan yang tidak mengalami kenaikan signifikan.
3. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan Bulu Taba untuk menghadapi kendala-kendala pada pelaksanaan implementasi kebijakan program smart tani di Kecamatan Bulu Taba Provinsi Sulawesi Barat adalah pelaksanaan serangkaian kegiatan program ada 3 macam aktivitas yaitu organisasi (organization), interpretasi (interpretation), dan aplikasi (application).

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu lokus saja yaitu Kecamatan Bulu Taba Provinsi Sulawesi Barat.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan implementasi Kebijakan Program Smart Tani di Kecamatan Bulu Taba Provinsi Sulawesi Barat.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Camat Bulu Taba Provinsi Sulawesi Barat beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Anwarudin, Oeng (2017). Faktor Penentu Partisipasi Petani Pada Program Upaya Khusus Padi di Kabupaten Manokwari Papua Barat. *urnal Penyuluhan Pertanian* Vol. 12, No. 1, Mei 2017. <https://doi.org/10.26740/PUBLIKA.V4N10.P>

ARDIKA, I Wayan; BUDHIASA, Gede Sujana. ANALISIS TINGKAT KESEJAHTERAAN PETANI DI DESA BANGLI KECAMATAN BATURITI KABUPATEN TABANAN. *PIRAMIDA*, [S.l.], v. 13, n. 2, p. 87-96, dec. 2017. ISSN 2685-788X.

Khodijah (2022). Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Petani Melalui Program Upsus Pajale Di Lampung Selatan. *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* Vol 15 No. 1

Mufidah, L. (2020). ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO DALAM UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI MELALUI PROGRAM PETANI MANDIRI (PPM). *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(7), 1443-1448. <https://doi.org/10.47492/jip.v1i7.245>

Vanya, Nonny Lavka. (2022). Sosialisasi Aplikasi Among Tani oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan untuk Mewujudkan Kota Batu sebagai “Smart City”. *Bandung Conference Series: Public Relations*, 6(1), 71–80. <https://doi.org/10.29313/bcspr.v2i1.586>

